

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan proses penerapan sistem desentralisasi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia.¹ Sejarah membuktikan bahwa sistem sentralitas menyebabkan sempitnya ruang bagi rakyat untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keberlangsungan disegala bidang, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Maka dari itu, sistem desentralisasi ditetapkan untuk membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.²

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-Undang tersebut merupakan landasan bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah menuntut adanya reformasi yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Serta menuntut daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan pembangunan.³ Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk

¹ Natal Kristono, *Otonomi Daerah*, (Semarang: Unnes Press, 2015), hal. 1.

² *Ibid*, ... hal. 2.

³ Marihot Pahala S, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 1/Peraturan.bpk.go.id

mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan.⁴

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah yang dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah.⁵

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan.

Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bertujuan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali potensi

⁴ Pheni Chalid, *Otonomi Daerah masalah, pemberdayaan dan konflik*, (Jakarta : Kemitraan, 2005), hal. 15.

⁵ Leiwakabessy, dalam (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006), hal. 29.

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.⁶

Sumber pendapatan asli daerah yang mempunyai potensi cukup tinggi adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut dapat dipahami mengingat banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, ada hal menarik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, yaitu banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor tersebut. Adapun perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah pajak bisa dipungut oleh pemerintah pusat (nasional) sedangkan retribusi hanya bisa dipungut oleh pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir yang Diterapkan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi parkir yang diterapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Manfaat Penelitian

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 51.

- a) Bagi Penulis Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang telah dikaji di Perguruan Tinggi.
- b) Bagi Instansi Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah supaya dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan pada objek.⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan berbagai pengamatan langsung pada pegawai UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas-tugasnya, selain itu penulis juga mendatangi area yang menjadi tempat parkir untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan yang berkaitan

⁷ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 200), hal. 64.

dengan retribusi parkir Kabupaten Banyumas. Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan, yaitu penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari ruang lingkup perparkiran, hanya sebagai pengamat independen.⁸

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹ Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung dari dokumen, arsip, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas, seperti peraturan daerah, kontrak kerja dengan pihak ketiga, laporan bulanan, laporan tahunan dan lain sebagainya.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka atau tidak menggunakan struktur yang ketat akan tetapi diarahkan pada fokus permasalahan dengan tujuan agar dapat menggali informasi yang benar dan jujur secara mendalam tentang pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas dari informan. Dengan demikian maka akan didapatkan data (informasi) tentang opini dan persepsi dari objek penelitian secara langsung baik kata-

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.145.

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 73.

¹⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 72.

kata maupun tindakan informan. Data dan hasil wawancara tersebut kemudian dicatat dan direkam.

1.6 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, jadwal yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan kepada penulis adalah 5 hari kerja dengan ketentuan berangkat sesuai dengan jam karyawan, yaitu dimulai pada pukul 08.00 – 15.30, namun selama Pandemi Covid-19 ini jam kerja Mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau Magang dikurangi menjadi jam 09.00 – 13.00 saja dengan Protokol Kesehatan Covid-19 yang sangat ketat. Beberapa kali penulis juga diberikan tugas dengan sistem *Work From Home* (WFH).

Dalam proses pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dibagi dalam 3 tahap, yaitu :

1) Tahap Persiapan PKL

Sebelum melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan seorang Mahasiswa diwajibkan untuk mencari tempat untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan seperti penulis memilih Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan berlangsung. Mahasiswa datang langsung ke tempat yang dituju dan menanyakan apakah tempat yang dituju tersebut bersedia atau tidak untuk menerima Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan atau Magang, jika diizinkan maka Mahasiswa harus segera bergegas untuk membuat surat izin Praktik Kerja Lapangan yang dibuat di Fakultas sehingga nantinya ketika surat tersebut sudah jadi, Mahasiswa tinggal mengirimkan saja surat tersebut kepada instansi terkait, biasanya dari instansi memerlukan waktu

sekitar 2-3 hari untuk menyetujui surat izin Praktik Kerja Lapangan tersebut.

2) Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, ketika penulis sudah mendapatkan jawaban diperbolehkannya melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Pada hari pertama, penulis diharapkan untuk datang dalam rangka untuk pengantar kegiatan Praktik Kerja Lapangan, hal-hal apa saja yang diperbolehkan untuk dikerjakan dan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakan itu dijelaskan pada hari pertama yaitu sebagai hari pengantar awal kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

3) Tahap Penyusunan Laporan

Proses penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan ketika masa Praktik Kerja Lapangan sudah berakhir. Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Biasanya pembimbing lapangan di instansi tempat para Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapanganlah yang nantinya membantu untuk mencari data yang diperlukan tersebut. Nantinya data tersebut akan diolah supaya dapat menjadi sebuah bahan kajian Mahasiswa untuk menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan dan dapat menarik kesimpulan.

4) Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan					
		Oktober 2020	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021
1	Tahap Persiapan PKL	■					
2	Tahap Pelaksanaan PKL		■	■			
3	Tahap Penyusunan Laporan				■	■	■

